

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Peran aktif pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri, merupakan tantangan yang harus diterima oleh pemerintah daerah agar dapat membangun dan mengelola data daerah masing-masing dengan baik.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,menjelaskan otonomi daerah adalah hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonomi nuntuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halim (2001:167).menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1). Kemampuan keuangan daerah,Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelolaan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahnya,(2).ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin,Agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar karena saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat ketergantungan pada penerimaan yang berasal dai pemeintah pusat.

Halim (2001:167) Beberapa permasalahan keuang daerah yang dihadapi pada Kabupaten Flores Timur antara lain:(1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercemin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin,yaitu subsidi daerah otonomi maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah,(2) randahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi – potensi

sumber – sumber pendapatan asli daerah yang tercremin dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif kecul dibandingkan total penerimaan daerah,(3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber – sumber yang ada,(4) inefisiensi pemerintah daerah melakukan belanja daerah.

Dalam rangka optimalisasi otonomi, daerah tertuntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut maka satuan kerja pengelolaan pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

Nuhayati (2015) Penilaian kinerja pengelolaan keuangan tersebut dilakukan terhadap APBD yang dilakukan pemerintah daerah yang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawab keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan baik atau tidak, Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah tersebut adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Syamsi (2006) Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber – sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya menggunakan mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat, pemerintah daerah juga memiliki fleksibilitas dalam menggunakan dananya sesuai dengan aturan yang berlakukan.

Halim (2012:230) Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio

keuangan, diantaranya rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

Menurut Halim (2012:221-234) Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat.

Mardiasmo (2013:112) Rasio efektifitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Mardiasmo (2013:112) Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurut Halim (2012:236) Rasio keserasian menggambarkan bagaimana dari pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Menurut Mahmudi (2010:138) rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan perbandingan skema kinerja yang pelaksanaannya. Selain itu digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja

khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintah pada Kabupaten Flores Timur pada tahun 2016-2020. sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintah, pembangunan dan melayani masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah kabupaten flores timur berhasil menjalankan tugasnya baik atau tidak.

Untuk mengetahui Kabupaten Flores Timur dalam mengelola Sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, dalam menunjang pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Flores Timur, maka berikut ini data tentang perkembangan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur tahun 2016-2020.

Tabel 1.1

Data Anggaran Dan Realisasi PAD Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 -2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Perubahan	
			(dalam ribu rupiah)	Absolut(%)
2016	53.825.738.100,00	50.183.797.225,36	0	0
2017	90.212.914.900,00	81.728.552.104,60	31.544.754.879,24	62,85
2018	63.726.544.400,00	10.777.627.187,00	(70.950.924.917,6)	(86,81)
2019	79.303.069.236,80	61.167.156.404,84	50.389.529.217,84	467,53
2020	64.253.713.857,00	52.535.561.927,39	(8.631.594.477,45)	(14,11)

Sumber: Laporan Realisasi dan Anggaran Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa PAD Kabupaten Flores Timur mengalami perubahan setiap tahun. Sebagaimana yang terlihat dari data realisasi tersebut, data tahun 2016 sampai 2017 realisasi PAD Kabupaten Flores Timur mengalami peningkatan, Sedangkan pada tahun 2018 PAD mengalami fluktuasi dengan tingkat absolut sebesar 86,81 % dan tahun 2019 kembali meningkat dengan tingkat absolut sebesar 467,53. Dilihat dari PAD lima tahun terakhir yang selalu berubah khususnya tahun 2018 dan 2020 mengalami fluktuasi maka perlu diadakan analisis terhadap kinerja pemerintah daerah ini.

Penelitian Terdahulu: Masita Mahmud, George Kawung dan Wensy Rompas (2004) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan adalah dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik

Penelitian Terdahulu: Mariani (2013), melakukan penelitian tentang analisis kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten / Kota di Sumatra Barat sudah efisiensi walaupun mengalami penurunan setelah terjadi pemekaran daerah, tetapi tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat.

Afriyanto dan Astuti (2013), Melakukan penelitian bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Rokun Hulu rata – rata sudah efektif, efisien dan mengalami pertumbuhan yang positif, Tetapi tingkat kemandirian masih sangat rendah dan sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk belanja rutin dan belanja modal.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian iningn melakukan penelitian dengan judul: Analisis Kinerja Keuangan Pemerinta Daerah pada Kabupaten Flores Timur tahun 2016-2020 dengan menggunakan alat ukur analisis rasio keuangan.

1.2. Masalah penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Maka masalah dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur.

1.3.Persoalan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Maka menjadi masalah pokok dalam penelitian:

- a. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2016-2020.
- b. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur di lihat dari rasio efektifitas pada tahun 2016-2020.
- c. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur di lihat dari rasio efisensi pada tahun 2016-2020.
- d. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dilihat dari rasio keserasian pada tahun 2016-2020.
- e. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dilihat dari rasio pertumbuhan pada tahun 2016-2020.

1.4. Tujuan Dan Kemanfaatan Penelitian,

1.4.1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur yang berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2016-2020.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur yang berdasarkan rasio efektifitas pada tahun 2016-2020.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur yang berdasarkan rasio efisiensi pada tahun 2016-2020.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur yang berdasarkan rasio keserasian pada tahun 2016-2020.
- e. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur yang berdasarkan rasio pertumbuhan pada tahun 2016-2020.

1.4.2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai berikut:

- a. akademik

Menambah wawasan akademik mengenai rasio-rasio yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan terhadap APBD untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah.

b. Praktis

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan, dan strategi untuk perbaikan kinerja keuangan daerah. Dan bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.